

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena politik seperti politik uang (*money politics*), politik identitas dan hoax politik marak terjadi dan tidak dapat dihindari saat sebelum pemilu dan pasca pemilu. Money politic adalah istilah yang mendeskripsikan pemakaian uang atau imbalan lain untuk mempengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh individu, kelompok, atau lembaga. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan (2010: 19) menyatakan *money politic* sebagai praktik yang dapat dipengaruhi oleh uang pada setiap tahapan pemilu, yang mengarah pada kepentingan satu parpol atau calon atau merugikan kelompok politik lain. Ada banyak bentuk dan tahapan politik uang dalam pemilu. Contohnya yaitu politik uang pada tahapan pencalonan, transaksi suara pada tahapan pemilu dan perhitungan suara. Termasuk menyuap pelaksana pemilihan umum selama fase penghitungan dan rekapitulasi suara, serta menyuap saat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Masalah lainnya adalah *money politic* dapat melahirkan pemilihan umum menjadi kontetasi yang timpang dan kotor. Penerapan suap ini pasti berbiaya tinggi dan harus dilakukan dengan biaya yang besar. Sedangkan tidak semua orang memiliki biaya yang besar (Ghaliya, 2019: 44).

Selain itu, dalam pemilu juga terdapat fenomena permasalahan lainnya yaitu banyak terjadi politik identitas dalam pemilu. Politik identitas adalah perilaku politik yang mempunyai sentimen etnis, ras, dan agama untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Pada hakekatnya identitas adalah sesuatu yang baik karena melekat pada diri kita sendiri, seperti melekat pada kota, desa, atau hal-hal orisinal lainnya yang telah kita ciptakan. Tetapi, ketika identitas menjadi politik atau politisasi identitas dilakukan oleh elit politik, identitas bisa menjadi alat pemecah belah negara. Proses pemilu yang seharusnya menjadi tempat untuk menyampaikan keinginan rakyat, namun justru dipertainkan oleh politik identitas. Identitas politik dianggap sebagai alat untuk memperoleh suara masyarakat dan mempertahankan kekuasaannya, sayangnya pemerintah gagal mengelola pemerintahan yang adil dan bijaksana. Selain

Muhammad Shabri Sambojo Utomo, 2022

PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

itu, opini publik media publik terkadang berbeda dengan kenyataan, mem perburuk keadaan. Padahal tidak dapat dipungkiri banyak rakyat di Indonesia juga sudah mengimplementasikan sikap tenggang rasa dalam keberagaman, namun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan situasi, sehingga masyarakat mudah di adu domba (Qotimah & Barokah, 2020: 101)

Alasan penulis memilih politik uang dan politik identitas sebagai sebuah permasalahan adalah politik uang bisa melatih masyarakat untuk bertindak curang dan utnuk para pelaku praktik politik uang yang terpilih bisa menyalahgunakan jabatan, terlibat korupsi dan terciptanya produk perundangan yang tidak tepat sasaran karena mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukanlah ahli dibidangnya dan akan sangat merugikan Negara, karena Negara menjadi tidak berkembang (Kpu-tanjungpinangkota.com, 2020). Selain itu, politik identitas ini menjadi sebuah permasalahan karena politik identitas bisa mengancam ketentraman bangsa karena hilangnya pluralitas atau sifat toleransi sehingga bisa membuat masyarakat saling berselisih dan menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Selain kedua fenomena permasalahan politik uang dan politik identitas yaitu banyaknya berita palsu atau hoax. Hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di Indonesia khusus-nya di media social terutama hoax mengenai isu politik. Hoax politik dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak di ketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoax dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial. Hoax politik ini menjadi masalah karena bisa membahayakan semua pihak. Hoax mengenai politik bisa menimbulkan perpecahan yang mengancam integrasi bangsa.

Fenomena politik uang, politik identitas, dan hoax politik tidak hanya terjadi saat menjelang pemilu tetapi pasca pemilu fenomena politik seperti politik uang, politik identitas, dan hoax juga dapat terjadi. Fenomena politik uang, politik identitas dan hoax yang dijelaskan diatas dapat terjadi karena karena masyarakat belum terdidik secara politik dengan optimal maka dari itu pendidikan politik sangat diperlukan. Pendidikan politik memiliki beraneka macam pengertian, bergantung

Muhammad Shabri Sambojo Utomo, 2022

PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pada sudut pandang dan dimensi yang ingin dibicarakan, tetapi semuanya harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan politik secara umum adalah “Upaya memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, mengembangkan kesadaran setiap warga negara berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan rasa kepekaan dan pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara” (Naning, 1982:9).

Pendidikan politik sangat penting karena keberadaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sikap dan kematangan politik masyarakatnya. Keadaan darurat pendidikan politik di Indonesia saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi belum lagi banyak korban jatuh karena mengadopsi budaya politik yang tidak sehat dan keadaan pendidikan politik saat ini masih belum optimal dalam kondisi masyarakat yang seharusnya di mana politik pemahaman selalu ditafsirkan oleh orang awam dalam arti negatif mereka menganggap politik itu kotor penuh polusi, konflik, tipu daya, brutal, tidak manusiawi, dll. Bahkan ada orang yang tidak mengerti politik. Orang sering berbicara tentang politik tetapi tidak menyadari arti politik yang sebenarnya bahkan terkadang orang takut untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Berdasarkan fenomena tersebut dalam kehidupan masyarakat pendidikan politik menjadi sangat penting dan urgen bagi masyarakat. (Febriani, 2019: 82).

Aktor adalah pelaku pendidikan politik. Aktor dalam pendidikan politik meliputi; parpol, keluarga, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan (Nur Khoiron, 1999: 38). Menurut Permendagri No 36 Tahun 2010, pelaku pendidikan politik adalah a. partai politik; b. parpol lokal; c. lembaga kemasyarakatan; d. organisasi nirlaba lainnya; dan e. organisasi atau instansi vertikal di daerah. berdasarkan pernyataan ahli dan peraturan mendagri diatas dapat dilihat actor pendidikan politik yang paling berperan adalah partai politik. Partai politik memiliki hubungan dengan pendidikan politik karena partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik akan berhasil jika sebagian besar warga di lingkungan tersebut mampu berkontribusi dalam politik dan pengambilan

Muhammad Shabri Sambojo Utomo, 2022

PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019

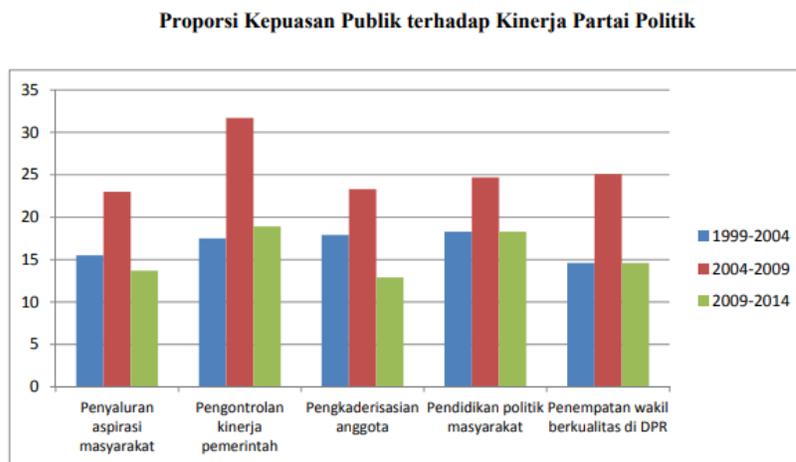
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

keputusan. Partisipasi nyata masyarakat dalam politik terlihat pada pemilihan parlemen langsung, saat dalam pemilu. Semakin tinggi angka partisipasi dan semakin rendah angka golongan putih dalam pemilu tersebut memperlihatkan bahwa parpol sukses melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan politik masyarakat (Kusuma dkk, 2020: 166).

Pendidikan politik bagi masyarakat dapat berlangsung sebagai bagian dari berbagai kegiatan, baik formal maupun nonformal. Setiap partai politik memiliki kebijakannya masing-masing mengenai bentuk kegiatan pendidikan politik contoh bentuk kegiatan seperti mengadakan seminar, workshop, kursus pelatihan, jambore, sekolah atau kegiatan positif lainnya (Kusuma dkk, 2020: 167). Pendidikan politik juga bisa menasar kader partai dan caleg. Pendidikan yang diberikan parpol merupakan modal awal mereka agar bisa langsung disampaikan ke masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjelaskan pentingnya politik saat ini (Daud, 2019: 3).

Gambar 1



Sumber: Diolah dari Litbang KOMPAS dalam Nainggolan (2016: 22)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Partai Politik di bidang Pendidikan politik masyarakat sempat mengalami peningkatan dari tahun 1999 – 2004 ke tahun 2004 – 2009 kemudian mengalami

kemerosotan dari tahun 2004 – 2009 ke tahun 2009 – 2014. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat kecewa dengan kinerja Partai Politik dalam Pendidikan Politik. Salah satu indikatornya adalah pendidikan politik belum dilakukan dengan optimal oleh Partai Politik ditambah pendidikan politik hanya dilakukan pada masa pemilu saja. Seperti yang dilansir dari rri.co.id menurut pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Hermansyah berpendapat Selama ini, setelah pemilu, partai politik lepas tangan dan tidak melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (rri.co.id, 2019).

Partai politik tidak optimal dalam pendidikan politik karena beberapa hal: pertama, partai politik kekurangan dana untuk melakukan pendidikan politik dikarenakan uang yang dikeluarkan juga dipakai sebagai dana operasional sekretariat dan perawatan kantor sehingga uang yang diterima tidak akan mencukupi jika digunakan semata-mata untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Kedua, masih banyak anggota partai dan kader yang menganggap masa reses adalah pendidikan politik padahal masa reses adalah kewajiban bagi anggota legislatif untuk menerima aspirasi dan keluhan masyarakat di daerah pemilihannya. Ketiga, sikap ketidakpedulian dan skeptis dari masyarakat yang menganggap semua parpol sama saja, yaitu datang kepada masyarakat hanya untuk mengumpulkan masyarakat untuk menggalang dukungan ketika Pemilu dilakukan. Hal ini terjadi, karena kader dan anggota partai tidak memiliki komitmen nyata terhadap pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat (Fadillah, 2017: 11).

Penulis memilih Partai NasDem dalam penelitian ini adalah karena partai NasDem tergolong partai yang baru didirikan pada tahun 2011 dan mampu meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 memperoleh 8.402.812 atau 6,72 persen suara. Saat Pemilu 2019, Suaranya meningkat menjadi 12.661.792 atau 9,05 persen suara. Hasil suara ini mampu meningkatkan posisi NasDem yang awalnya berada pada urutan 7 menjadi 5 besar (Nasional.kompas.com, 2019). Sementara itu khususnya di Pileg 2019 DPRD DKI Jakarta Partai NasDem

memperoleh 309.790 suara di Jakarta dan memperoleh 7 kursi dari periode sebelumnya hanya 5 kursi (Mediaindonesia.com, 2019).

Kemudian, Partai NasDem adalah Partai pertama yang melakukan politik tanpa mahar. NasDem membebaskan semua biaya atau mahar politik bagi kepala daerah yang akan maju bersama NasDem (willyaditya.com, 2018). Slogan “Politik tanpa mahar” diciptakan bukan sebagai pencitraan, melainkan untuk menyerap keluhan masyarakat mengenai politik yang disamakan dengan uang. Partai NasDem akan terus berkomitmen membuat demokrasi tanpa mahar politik. Mahar politik diyakini menjadi salah satu penyebab munculnya praktik korupsi yang membuat publik tidak mempercayai parpol (Okezone.com, 2019).

Bukti politik tanpa mahar didalam konteks pendidikan politik NasDem yaitu Partai NasDem membekali para caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dan kader Partai melalui pendidikan politik di sekolah legislative berupa materi pemahaman dasar mengenai politik tanpa mahar. Partai NasDem adalah partai yang tanpa mahar politik sehingga para calon legislatif dan kader partai diberikan pemahaman dasar mengenai politik tanpa mahar yang membedakan partai NasDem dengan partai lainnya. Caleg dan kader partai NasDem tidak diizinkan mengurus proyek, mencurangi atau mengakali APBN/APBD dan membekali soal moralitas (Merdeka.com, 2018).

Salah satu contoh hasil pembekalan pendidikan politik tanpa mahar Partai NasDem yaitu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 Partai NasDem berhasil membuat kejutan. Partai NasDem berhasil menang di 11 provinsi dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada 2018. Dan di empat provinsi, NasDem mampu membawa kader internalnya menjadi Kepala Daerah (PartaiNasdem.id, 2018). Selain itu, penulis memilih Partai NasDem dalam konteks pendidikan politik adalah Partai NasDem memiliki lembaga pendidikan politik yang bernama Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem ciri khas yaitu memiliki kurikulum, kurikulumnya adalah aspek kepribadian, aspek kepartaian dan aspek kebangsaan.

Muhammad Shabri Sambojo Utomo, 2022

PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Peneliti memilih DKI Jakarta karena DKI Jakarta adalah Ibukota negara Republik Indonesia sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus menjadi barometer politik nasional. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peeneliti belum banyak penelitian atau riset yang membahas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai NasDem terutama di DKI Jakarta. Memang, yang membahas pendidikan politik partai NasDem sudah ada tetapi, itu baru dilakukan di pekanbaru pada tahun 2015/2016 karya dari Ichwan Nur Fadhillah. Peneliti memilih Partai NasDem DKI Jakarta untuk diteliti karena Partai NasDem DKI Jakarta tidak terdapat kekurangan dana dalam kegiatan atau program pendidikan politik terlihat penggunaan dana dalam LPJ untuk melaksanakan program pendidikan politik, Partai NasDem DKI Jakarta bisa menggunakan dana puluhan juta sampai ratusan juta (LPJ Bantuan Keuangan DPW NasDem DKI Jakarta, 2020).

Selain itu, penulis memilih periode pasca pemilu serentak 2019 karena menurut penulis partai politik biasanya sangat gencar dalam memberikan pendidikan politik saat menjelang pemilu dan mulai berkurang intensitas dalam memberikan pendidikan politik setelah pemilu dilaksanakan sehingga penulis tertarik untuk meneliti pada periode pasca pemilu serentak 2019. Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk melihat peran dan proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem untuk masyarakat DKI Jakarta. Melalui penelitian berjudul: Peran Partai NasDem Dalam Pendidikan Politik Di Dki Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Rumusan Masalah dalam peneitian ini adalah

1. Bagaimana peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan focus masalah diatas, maka tujuan dari riset ini yaitu Untuk mendeskripsikan peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat DKI Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, bahwa riset ini diharapkan memiliki manfaat dalam ilmu politik baik secara langsung maupun tidak langsung. manfaat penelitian nya yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Riset ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang Peran Partai NasDem Dalam Pendidikan Politik Di Dki Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019. Kajian tentang peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik di Indonesia memang sudah sangat bermacam-macam. Namun baru sedikit penelitian yang secara khusus focus pada usaha Partai NasDem dalam memberikan pendidikan di DKI Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019. Maka dari itu, Riset ini diharapkan bisa menyajikan literatur baru mengenai Peran Partai NasDem Dalam Memberikan Pendidikan Politik Di DKI Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Riset ini diharapkan dapat berfungsi sebagai tolak ukur dalam optimalisasi peran dan fungsi Partai NasDem sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah mengenai peran partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Muhammad Shabri Sambojo Utomo, 2022

PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bab ini meliputi penelitian terdahulu, definisi konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik dan teori partai politik dan pendidikan politik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, cakupan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV peneliti akan memaparkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan latar belakang masalah dan menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah dirumuskan dalam pendahuluan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan dan penyelesaian penelitian, sedangkan saran merupakan alternative untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada berkaitan dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun proposal skripsi.